

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah yang diajukan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Ayat 3). Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Keppres No. 70 Tahun 2002, diatur mengenai struktur instansi Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari, unsur Pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, unsur pelaksana pendidikan dan atau/pelaksana staf khusus, unsur pelaksana utama pusat. selain struktur organisasi tersebut, instansi kepolisian juga memiliki tugas pokok yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sendiri memiliki sebuah sistem yang terintegrasi dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Bagian dari sistem terintegrasi tersebut salah satunya adalah Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) yang berwenang untuk pelaksana penegakan hukum ditingkat kota. Polrestabes membawahi beberapa Polsek (Kepolisian Sektor). Polisi sendiri membantu masyarakat dalam

menangani kasus yang beraneka ragam seperti; pencurian, perkelahian, tawuran, perampokan hingga kasus-kasus besar yang menjadi sorotan media nasional. Polrestabes, menangani beberapa kasus baik kasus yang menjadi sorotan media massa dan publik maupun kasus-kasus lainnya. Dalam menangani kasus ini dibutuhkan kekompakan antar para personel di lingkungan Polrestabes itu sendiri.

Dalam instansi kepolisian ini seringkali terjadi masalah yang disebabkan adanya ketidaksesuaian dan pengabaian instruksi yang diberikan pimpinan kepada bawahan. Seperti dalam contoh kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyoroti kinerja tim gabungan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. ICW menyebut tim bentukan Polri gagal mengungkap kasus teror terhadap Novel dalam masa kerja yang ditetapkan, yakni enam bulan. Tim Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Kapolri (Jenderal) Tito Karnavian untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dinilai gagal. Sebab, hingga batas waktu yang telah ditentukan, yakni enam bulan pasca resmi didirikan, tim tersebut tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri penyidik KPK tersebut. Sejak pertama kali dibentuk, masyarakat pesimis atas kinerja tim tersebut. Pertama, jika dilihat komposisi anggotanya, 53 orang diantaranya berasal dari unsur Polri. Selain itu, saat pertama kali kasus ini mencuat diduga ada keterlibatan polisi atas serangan terhadap Novel sehingga patut diduga akan rawan konflik kepentingan diantara berbagai pihak hingga internal polri sendiri (Fadhil Haris, 2019).

Menurut Ayu, S (2016) Kohesivitas sangat penting bagi kelompok karena menyangkut beragam anggota yang menjadi satu kelompok. Adanya kepuasan yang didapat dari individu dalam kelompok, maka membuat individu tersebut nyaman untuk bertahan dalam kelompok, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Kohesivitas dalam kelompok membuat para individu-individu yang menjadi anggota di kelompok

tersebut akan bersedia melakukan kegiatan yang sama maupun sesuai dengan tugasnya sebagai anggota Polrestabes. Masing-masing individu merasa bebas untuk mengemukakan pendapat dan saran. Biasanya individu juga antusias terhadap apa yang mereka kerjakan dan mau mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan kelompoknya tersebut. Individu rela menerima tanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Sooyoung shin dan Won-woo park (2009) menyatakan bahwa individu yang berkompeten yang memiliki kelompok yang terikat secara sosial, tidak hanya berkonsentrasi pada kerja sendiri-sendiri atau individu tetapi juga pada kelompoknya. Akibatnya kohesivitas kelompok positif mempengaruhi hubungan di kelompoknya. Walgito (2002) menyatakan bahwa kohesivitas yaitu suatu kualitas ketergantungan satu sama lain antar anggota kelompok. Kohevisitas sebenarnya bukan yang dibawa dalam kelompok tapi sebagai sesuatu yang berkembang dan terjadi dalam kelompok. Sehingga seorang pemimpin dapat mempengaruhi dan menginspirasi anggotanya untuk mau belajar dan bekerja ekstra dengan ikhlas.

Getol (2010) berpendapat bahwa peran kebersamaan dan kerjasama antar anggota organisasi dalam melaksanakan bahkan menyelesaikan tugas dengan baik sangat dilihat dari kohesivitas kelompok organisasi dan peran pemimpinnya. Kebersamaan dan kerjasama tersebut akan membuat kelompok lebih kohesiv karena dengan kerjasama dan kebersamaan akan terjadi interaksi yang berulang-ulang kemudian akan menimbulkan kedekatan antar anggota dan terjalin komunikasi yang baik juga (McShane & Gilinow, dalam Ginting 2009).

Syahputra (2015) menyebutkan bahwa untuk menggapai kohesivitas tersebut, diperlukan peran pemimpin untuk mengatur anggota kelompoknya. Mcshane dalam Ginting (2009) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang berperan dalam kohesivitas kelompok yang dapat dilakukan okeh pemimpin. Faktor tersebut adalah; 1) Pemimpin sebagai

komunikator, 2) Pemimpin sebagai motivator, 3) Keabsahan yang dimiliki seorang pemimpin.

Polresbates sebagai instansi yang membawahi beberapa Polsek dan harus menjalankan tugas-tugas pokoknya tentunya Polrestabes membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengatur dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama (Syahputra, Indra & Yasri, 2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahputra Indra & Yasri (2015) tentang Pengaruh Fungsi Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Personil Polisi. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa pemimpin harus memainkan peran dan fungsi kepemimpinannya sehingga diharapkan dapat mempengaruhi dan mendorong perilaku seorang bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan pemimpin dalam hal ini dilihat dari sejauh mana dirinya mampu mengelola dan memberdayakan bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan secara kelompok. Dengan kepemimpinan yang baik dari seorang pemimpin, sesuai dengan peran dan fungsi yang harus dilaksanakan, maka instansi dapat menyelesaikan tugasnya sebagai kelompok agar bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kinerja personel tentunya juga dipegaruhi oleh kepemimpinan pada institusi atau bagian tersebut.

Djastuti dan Yudayanti (2006) menyebutkan beberapa faktor yang dalam aspek kepemimpinan terhadap kondisi kelompok. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa aspek-aspek *leader power* dapat meningkatkan kepatuhan dan kepuasan kerja pegawai. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu, S (2016) tentang peran pemimpin dalam kohesivitas kelompok *marching band* menunjukkan bahwa peran pemimpin sangat penting untuk menjaga kohesivitas suatu kelompok sehingga anggota dapat termotivasi dan memberikan suatu contoh-contoh atau teladan dalam bekerja dan pemimpin juga harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki perspektif kedepan sehingga bisa melihat kesempatan-kesempatan apa saja untuk kelompoknya.

Berdasarkan fenomena tersebut, di dalam institusi kepolisian dibutuhkan seorang pimpinan yang memiliki *leader power* yang baik sehingga bisa membentuk susunan tim yang kohesif agar setiap terjadi suatu kasus, tim itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan menaikkan produktifitas kerja (Maria Rosa, dkk. 2002).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pasti akan menemukan masalah atau konflik yang muncul dalam berorganisasi, misalnya saja antara pemimpin dengan anggota yang di pimpinnya. Aria Rijki (2014) berpendapat, konflik biasanya terjadi karena adanya perbedaan antara masing-masing individu dalam organisasi tersebut dan konflik ini berkepanjangan maka para anggota akan menghilang dan tidak akan kembali pada kelompoknya tersebut, jadi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mengendalikan dan mengelola konflik. Maka dari itu Friska (2004) berpendapat bahwa *leader* memiliki fungsi sebagai berikut: memberikan inspirasi kepada anggotanya, menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan anggotanya, memberikan contoh kepada bawahan bagaimana melakukan pekerjaan, merundingkan dan menyelesaikan konflik yang ada dalam kelompok.

Dari kemampuan kepemimpinan seorang pemimpin itu juga dinamika organisasi terbentuk. Dengan demikian keberadaan pemimpin dalam suatu organisasi memiliki arti yang strategis (Gibson, 1987). Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi anggota untuk melaksanakan pekerjaan mereka sendiri (Ivancevick dkk, 2005). Peran seorang pemimpin sangat penting dalam institusi polisi. Pemimpin harus menggerakkan seluruh sistem yang ada di dalam institusinya. Menurut Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 pasal 7 ayat 2 poin a tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwaatasan wajib menunjukkan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (solutif), serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan (*quality assurance*). Menurut Rumawas. W (TT) Seorang pemimpin adalah

seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang. Seorang pemimpin juga seorang yang aktif menyusun rencana-rencana, mengkoordinasi, serta melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

Djastuti dan Yudayanti (2006) berpendapat bahwa dimasa-masa yang sulit diperlukan *superior leader* yang mampu mempengaruhi dan mengkoordinasikan segala sumber daya sehingga akan tetap bertahan bahkan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang dapat bertahan pada kondisi sesulit apapun serta dapat menjadi transformator untuk mengubah organisasi menuju ke sasaran yang lebih baik.

Apabila pimpinan sudah bisa mengatur, memberi arahan, memotivasi dan berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya maka dalam organisasi/instansi tersebut akan muncul kohesivitas.

Dari fenomena yang sudah dibahas di atas, peneliti tertarik meneliti Hubungan *Leader Power* Dengan Kohesivitas Pada Anggota Polrestabes di Kota Bandung.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu apakah ada hubungan *Leader Power* Dengan Kohesivitas Pada Anggota POLRESTABES di Kota Bandung?''.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kohesivitas, khususnya leader power pada anggota POLRESTABES di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dikarenakan belum adanya penelitian mengenai hubungan *leader power* dan kohesivitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dan referensi terkait kohesivitas pada bidang ilmu psikologi sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Polrestabes, untuk memberikan informasi bahwa dengan adanya penelitian ini baik anggota dan calon polisi bisa memahami terkait pentingnya kekuatan seorang pemimpin dalam mempengaruhi kekompakan di dalam satuan kepolisian agar setiap tugas yang diberikan dari pimpinan dapat diselesaikan dengan baik oleh setiap satuan kepolisian.
- b. Manfaat bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang kepemimpinan, tidak hanya fokus kepada pola kepemimpinan tapi juga kepada *leader power* dalam sebuah organisasi khususnya kepolisian.

E. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab nya terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Bab II Kajian Pustaka berisi tentang kajian teori *leader power* dan kohesivitas, beserta kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian berisi uraian yang membahas desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen yang digunakan, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan yang berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang dilakukan. Peneliti juga akan membahas keterbatasan penelitian dalam bab ini.

5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi berisi kesimpulan penelitian dan rekomendasi peneliti terkait variabel yang diteliti.